

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Literatur Review merupakan uraian lengkap mengenai teori, temuan dan juga bahan penelitian yang diperoleh oleh penulis untuk menjadi landasan guna mengklarifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Literatur Review juga digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

Dampak dari kerja sama bilateral ekonomi terhadap berbagai aspek termasuk dampaknya terhadap aspek Human Development Index (HDI) juga sedikit banyak menjadi topik bahasan dalam literature-literatur akademik yang ditulis oleh akademisi Hubungan Internasional, pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Tentu saja setiap penelitian atau kajian literature memiliki perspektif tersendiri berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menerapkan literature review sebagai kerangka yang disusun untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian. Dalam menyusun penelitian ini juga penulis menemukan beberapa literature yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi. Seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Astrid Pratiwi, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2019 yang

berjudul **“Kerja Sama Indonesia-Singapura Dalam Kawasan Industri Di Sektor Manufaktur: Studi Kasus Kawasan Ekonomi Kendal Periode 2016-2017”** yang dimana dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa dalam kerja sama bilateral ekonomi antara Indonesia dan Singapura ini terjadi kolaborasi wilayah industry kedua Negara yang mana kerja sama ini memiliki output produk-produk manufaktur. Teori kerja sama ekonomi bilateral, konsep kawasan industry dan ekonomi digital digunakan sebagai analisator oleh peneliti untuk memahami objek penelitian ini. Diantaranya: kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura, pelaksanaan serta implementasi kerja sama tersebut tentunya sangat disoroti melalui proses kerja sama, langkah-langkah investais, penyerapan tenaga kerja dan berbagai kesepakatan yang dijalankan dalam priode masa mendatang. Dalam analisisnya peneliti menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura dijalankan melalui komitmen yang disepakati para elit politik dan selanjutnya berujung pada langkah investasi yang dilakukan pemerintah Singapura dan adanya keterlibatan swasta untuk mengimplementasikan berbagai macam kegiatan industrial, seperti penyerapan tenaga kerja dan produksi berbagai hasil manufaktur.

Literatur selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Fachran Adi Suryadi, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 yang berjudul **“Kerja Sama Indonesia dan Singapura Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus”**. Peneliti skripsi ini memaparkan dalam penelitiannya bahwa ini adalah sebuah kerja sama Bilateral anatara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah

perbatasan, pembahasan ini dikonsentrasikan kepada kerja sama Indonesia dan Singapura dalam hal pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Peneliti berhasil menunjukkan di penelitiannya ini bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kerangka kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura yang mana pengimplementasiannya adalah terfokuskan kepada wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Begitu tertulis di penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Peneliti kembali menegaskan dalam hasil penelitiannya bahwa Kawasan Ekonomi Khusus ini memiliki berbagai macam potensi yang sangat dapat dikembangkan. Peneliti juga mengemukakan bahwa tujuan dari pada kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan antara lain menarik penanaman modal asing yang tentunya melibatkan keterkaitan pihak swasta, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta mengembangkan kerja sama ekonomi dalam Kawasan Ekonomi Khusus ini. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kerja sama Bilateral antara Indonesia dan Singapura bersifat saling menguntungkan dalam bidang ekonomi.

Peneliti juga dalam simpulannya menyebutkan bahwa dalam aspek kedaulatan, perbatasan suatu Negara tentunya sangat mempunyai peranan penting, dan dalam pelaksanaan untuk mengatur wilayah perbatasan ini suatu Negara memiliki berbagai dinamika yang tidak mudah juga. Bisa kita sebutkan terkait problematikan wilayah perbatasan ini dapat berupa penentuan batas wilayah dan

keutuhan wilayah. Nah dalam proses penentuannya ada beberapa aspek yang diterapkan, seperti hukum nasional dan internasional, politik dan proses historis juga menjadi aspek penentu. Pengelolaan serta penjagaan secara cerdas dan ketat tentunya diharuskan jika kita bicara mengenai wilayah perbatasan, apalagi seperti Indonesia yang mana untuk wilayah yang kita fokuskan ini (Kawasan Ekonomi Khusus, Batam Bintan dan Karimun) berbatasan langsung dengan Negara lain. Aktivitas di kawasan perbatasan seperti ini juga meliputi penjagaan keamanan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan budaya lokal, penataan lingkungan, peningkatan perekonomian sampai pula pada cerminan Negara itu sendiri di mata Negara tetangganya. Dari situasi dan kondisi seperti ini, permasalahannya meliputi keamanan, karena kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang memiliki dampak langsung terhadap aspek lain seperti kedaulatan Negara dan politik mengingat fungsinya sebagai outer terdepan Indonesia.

Terakhir, peneliti mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Singapura ini dapat dikatakan sebagai kerja sama yang cukup baik, karena kita dapat melihat bukti yang konkrit bahwa kedua Negara sebagai Negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur setiap individu individu dan bedna-benda yang berada di wilayah teritorialnya sebagaimana yang dipahami dalam menempatkan perannya dalam kerja sama ini dan juga pengimplementasian yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan ke arah positif bagi komunitas masyarakat di masing-masing wilayah perbatasan.

Literatur ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh M. Faqihudin, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti pada tahun 2010 dengan judul **“Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia”**. Dalam tulisannya ini penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari pembangunan selama ini mengedepankan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembangunan memiliki dimensi yang luas dimana manusia merupakan hakekat dari tujuan pembangunan itu. Oleh karenanya diperlukanlah konsep pembangunan manusia yang elemen-elemennya secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup yang layak. Elemen-elemen inilah yang kemudian menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI atau IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga aspek pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu: (i) Kesehatan; usia hidup (longevity), (ii) Pendidikan; pengetahuan (knowledge) dan (iii) ekonomi; standar hidup layak (decent living).

Literatur keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Nurichsan Hidayah Putra Harahap, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau pada tahun 2019 yang berjudul **“Penerapan Kerja Sama Ekonomi Digital Indonesia-Singapura di Batam Tahun 2017-2018”**. Dalam penelitiannya, penulis bertujuan untuk menjelaskan implemantasi dari pada kerja sama ekonomi digital Indonesia-Singapura di Batam. Ekonomi Digital di

Indonesia berkembang dengan sangat pesat, Indonesia berada pada fase dimana kekuatan ekonominya sedang melesat sehingga dalam hal ini Indonesia melakukan kerja sama dengan Singapura untuk terus meningkatkan ekonomi digitalnya. Pemerintah Indonesia dan Singapura kemudian telah menyepakati kerja sama dalam bidang ekonomi digital ini, alhasil dalam pengimplementasian kerja sama ekonomi antar kedua Negara ini telah didapatkan outputnya yaitu didirikannya Nongsa Digital Park di Batam. Nongsa Digital Park ini merupakan salah satu bentuk infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi digital, khususnya dalam pengembangan start-up digital.

Di masa sekarang ini dunia industri telah memasuki era 4.0 yang mana telah ditandai dengan banyaknya aspek teknologi yang meliputi setiap aktivitas ekonomi antar satu dengan yang lain, dikenal dengan istilah ekonomi digital, dimana segala sesuatu aktivitas perekonomian yang terjadi di platform yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi bias dikategorikan sebagai Ekonomi Digital. Pada era Ekonomi Digital ini teknologi tentunya dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan perekonomian, baik itu dalam hal pemasaran, komunikasi antar penjual dan pembeli hingga transaksi. Terobosan mengenai kegiatan yang sangat memajukan perekonomian dunia ini tentunya juga akan sangat berimbas kepada aspek perekonomian suatu Negara yang tentunya dengan teknologi yang sudah maju. Perusahaan-perusahaan multinasional yang berskala besar juga sangat setuju dengan semakin majunya teknologi untuk menunjang aktivitas ekonomi yang ditandai dengan Ekonomi Digital ini, mereka akan sangat merasa untung dikarenakan kemudahan dalam melakukan proses jual beli dan

promosi. Kemajuan teknologi tentunya membuat semakin majunya teknologi internet yang mana menjadi sebuah aspek penting dalam pelaksanaan ekonomi digital ini, teknologi dalam aktivitas ekonomi sekarang ini sudah membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah untuk dicapai. Dalam aktivitasnya ekonomi dengan pengaruh majunya teknologi membuat pasar telah cenderung berhasil melewati berbagai rintangan dalam aktivitasnya, teknologi internet dalam pemasaran juga telah melebihi perannya yang hanya sekedar pertukaran informasi antar penjual dan pembeli menjadi sarana aplikasi untuk mengembangkan pemasarannya dalam bentuk promosi, pelayanan pelanggan, dll. Dengan ini para pelaku ekonomi ini tidak lagi mengalami kesulitan yang berarti dalam pelaksanaan pemasaran mereka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ekonomi politik internasional, yaitu perspektif merkantilisme. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis terdepan untuk pembangunan sebuah Negara modern, pandangan ini mengenai aktivitas ekonomi ini seharusnya tunduk kepada tujuan utama dalam membangun Negara yang kuat. Dalam perspektif merkantilisme ini Negara dilihat sebagai actor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonommi demi meningkatkan kekuatan kekuasaan Negara, kebijakan ekonomi merkantilisme harus digunakan untuk membangun Negara yang lebih kuat. Dari perspektif ini, Negara adalah pasar dan hubungan pasar yang terbentuk oleh kekuatan politik, pemikiran merkantilisme ini bersifat deskriptif dan prediktif dimana system ekonomi nasional deskriptif mempertahankan produksi, konsumsi, pertukaran dan investasi yang diatur oleh

kekuatan politik. Untuk meraih tujuan utama yang mana itu ialah kesejahteraan dan kekayaan, Negara yang menganut perspektif merkantilisme ini memiliki siasat khusus, yaitu dengan memperluas pasar dan meningkatkan perdagangan global. Secara garis besar sifat pokok dari pada perspektif merkantilisme ini ialah menitikberatkan pada perdsagangan antar negaea, kepentingan untuk mencapai suatu kemakmuran dan usaha untuk mengembangkan kekuasaan.

Literatur kelima adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Indra Hernawa, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik, Universitas Komputer pada tahun 2019 yang berjudul **“Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Pengembangan *Special Economic Zone* di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Setelah Diberlakukannya *Asean Economic Community* Tahun 2006-2017”**. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2006-2017. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap hasil kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura dalam pengembangan KEK di kawasan BBK pasca berlakunya MEA.

Tujuannya dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura dalam sektor pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan dan Karimun setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2006-

2017, penulis melakukan analisis terhadap hasil dari pada kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura dalam pengembangan KEK di BBK pasa diberlakukannya MEA.

Hasilnya, peneliti menyebutkan bahwa kerja sama menjadi dasar pemikiran kuat, konteks hubungan bilateral, kerja sama ekonomi Indonesia-singapura saling melengkapi serta kehadiran MEA membuat KEK semakin dibutuhkan. Sekali lagi disebutkan bahwa kerja sama memegang peranan penting dalam hubungan internasional, sangat diperlukan oleh Negara sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam menjalin hubungan antar bangsa. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa dalam hubungan bilateral kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura ini keduanya saling melengkapi satu sama lain dan juga memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi, dimana Indonesia mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar jika dibandingkan dengan Singapura yang mempunyai Knowledge, networking, financial resources serta technological advance.

Kemudian dalam usahanya untuk merealisasikan kerangka kerja sama ekonomi dalam pengembangan Special Economic Zone (SEZ) di wilayah BBK melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun ini, dibentuklah tim pengurus Joint Steering Committee dan Join Working Group dengan diberlakukannya pelayan terpadu.

2.2 Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan menyantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut praktikum penulis, sehingga terdapat relevansi antara apa yang penulis tuangkan dalam praktikum dengan teori-teori yang sudah ada.

2.2.1 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini akan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Kepentingan nasional sendiri merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan dan sebagai refleksi yang dirasa (terdapat) dalam sebuah negara dalam lingkungan sosial. Jika negara belum mencapai kepentingan nasional, maka negara memiliki beban moral. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mencapai kepentingan tersebut sesuai yang dikehendaki. Namun kepentingan negara tidak selamanya dapat berjalan tanpa adanya sebuah kontrol dari pemerintah internasional (Granville, 2005).

Pengertian kepentingan nasional menurut Plano dan Olton dalam buku “Kamus Hubungan Internasional”:

“Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi” (Plano, Jack C, 1998)

Adanya kerjasama menciptakan hubungan yang saling ketergantungan antar negara hal tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Konsep kepentingan nasional yang merupakan dasar dari terbentuknya kebijakan luar negeri dalam masalah ini digunakan untuk menjelaskan tujuan dari tindakan Indonesia dan Singapura dalam menjalin kerja sama ekonomi ini, selain itu melalui konsep ini membantu penulis untuk menganalisis apa yang kedua Negara ini dapatkan, selain aspek ekonomi entah itu sosial atau politik.

2.2.1.1 Kepentingan Kawasan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan fungsi utama mempertahankan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara) dan yang memiliki hubungan fungsional (keterkaitan).

Definisi Kawasan Perbatasan. Negara Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- a. Merupakan kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan dan pertahanan dan keamanan.
- b. Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karna mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sedangkan yang dimaksud Wilayah Perbatasan Negara adalah suatu wilayah negara yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Wilayah perbatasan negara dapat ditemukan di wilayah daratan, perairan dan ruang udara. Pembahasan dalam penelitian ini terkait yang menjadi bagian dari permasalahan perbatasan di satu sisi adalah memberikan perhatian pada pengelolaan kawasan perbatasan laut, mengingat posisi dan kondisi kawasan yang berada di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga yang secara jelas menunjukkan perbedaan baik fasilitas atau infrastruktur maupun kesenjangan lainnya seperti keamanan, lingkungan, lintas batas dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan, disisi lain juga memberikan perhatian terhadap kondisi perbatasan antar pulau yang juga menjadi faktor tidak kalah pentingnya yang diprioritaskan seperti pertahanan/keamanan dan lingkungan, meskipun tidak seluas dan sekompleks permasalahan pengelolaan kerjasama kedua negara di perbatasan darat.

2.2.1.2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Riau

Kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategic wilayah serta pula didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur, pemberian fasilitas dan insentif khusus guna kemudahan berinvestasi. KEK juga sudah tersebar di 19 wilayah dari timur hingga barat Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia sendiri terbagi 2 jenis KEK, yaitu KEK Industri yang mana merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas industry bernilai tambah dan juga KEK Pariwisata yang mana merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan serta kegiatan lainnya yang terkait. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang tentunya menyejahterakan semua, seperti dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada perkembangannya, guna mampu menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi

dan teknologi dunia, pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1), namun juga mendorong terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2), yang diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul.

Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri telah dilakukan hubungan bilateral dengan Negara yang bertetangga langsung dengan Provinsi ini, yaitu Singapura. Pemerintah Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama ekonomi guna memaksimalkan keuntungan dan keunggulan geoekonomi dan geostrategic dari Kawasan Ekonomi Khusus ini, di Provinsi Riau ini KEK berpusat di 3 pulau utama Provinsi, yaitu: Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Hingga saat ini progress yang telah berjalan dirasa menjadi modal yang sangat berpotensi kedepannya, bukan hanya omongan belaka dikarenakan telah ada 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan di Provinsi Kepulauan Riau ini, dimana menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menjadi satu-satunya Provinsi yang menyandang sebagai Provinsi dengan Kawasan Ekonomi Khusus paling banyak di Indonesia. Berpusat di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai 3 pulau utama dsari Provinsi Kepulauan Riau ini, ketiga KEK yang telah ditetapkan pemerintah itu diataranya terdiri dari 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tourism/Pariwisata yaitu KEK Nongsa dan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Industri, KEK Galang-Batang dan KEK Batam Aero Technic. Tentunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi modal dan harapan besar bagi seluruh komunitas masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahkan Indonesia.

2.2.2 Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar dalam perkembangannya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ekonomi adalah hal yang erat kaitannya dengan pencapaian kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam level internasional, negara dan pasar adalah inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005).

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “branch of science of a statesman or legislator” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas’oed, 2008). Fokus bahasan EPI terletak pada interaksi pasar dan aktor-aktor politik di dalamnya. Studi ekonomi tidak cukup untuk menjelaskan isu-isu vital di dalam distribusi

kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional, hingga dampak dari ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, serta keefektifan rezim-rezim internasional. Hal ini harus dilihat dari batas-batas politik negara, yang nantinya akan dapat menggambarkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya. Dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya (Gilpin, 1987). Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerjasama antarnegara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional.

2.2.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari perkembangan arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang akhirnya dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan,

asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara ini, diperlukan suatu instrumen kebijakan hukum dalam bentuk regulasi baik secara nasional maupun internasional seperti yang terjadi dalam pengaturan dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota world trade melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO) memberikan beberapa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO.

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong produk industri dalam negeri untuk mampu bersaing dengan produk impor, baik di dalam negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan suatu permasalahan besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih lemah. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas adalah sulitnya membendung terjadinya lonjakan produk impor, sehingga mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing yang pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri. Lebih-lebih Indonesia sedang menghadapi pasar bebas ASEAN pasca AFTA sejak tahun 2003 yang kemudian diikuti oleh pasar bebas Cina-ASEAN melalui kesepakatan CAFTA sejak tanggal 1 Januari tahun 2010, dan selanjutnya APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang pada tahun 2020. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan

pengamanan dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung guna memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk kegiatan perdagangan internasional. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan itu dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya.
3. Perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya baik dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya.
4. Sumber daya alam yang berbeda.

2.2.4 Kerja Sama Internasional

Sudah kita ketahui bahwa di dunia internasional bahwa tidak ada yang bias benar-benar berdiri sendiri dan melengkapi kebutuhannya sendiri, terutama dalam menciptakan sebuah kemajuan dan perkembangan dalam proses pembangunan negaraa itu sendiri. Setiap Negara bisa kita bilang memang

membutuhkan kerja sama dengan Negara lainnya dikarenakan seperti adanya suatu kondisi dimana satu Negara seperti ada suatu ketergantungan satu dengan yang lain sesuai pula dengan kebutuhan masing-masing Negara tersebut. Dilihat dengan adanya banyak kerja sama internasional dan berkembangnya berbagai aspek yang menjadi suatu objek yang dilakukan kerja sama antara satu sama lain berkaitan berbagai masalah dan kesejahteraan diantara Negara yang merupakan pelaku kerja sama itu sendiri, seperti itulah kita melihat perkembangan situasi kondisi hubungan internasional modern ini.

Suatu kerja sama internasional terjalin dari proses dari pada sebuah perpaduan beragamnya masalah nasional, regional maupun global yang ada dan diperlukan juga sebuah perhatian lebih dari satu Negara pastinya. Masing- masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa sebuah usul penyelesaian masalah, melakukan proses tawar-menawar, didiskusikannya suatu masalah tersebut, mengumpulkan bukti-bukti tertulis guna membenarkan suatu usul atau hal lainnya serta mengakhiri perundingan dengan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang mana dirasa akan membuat kedua belah pihak ini merasa terpuaskan.

Menurut K.J Holsti kerja sama dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya
- c. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selanjutnya, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh complex interdependence. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.⁸ Sebagai mana pula dikemukakan Koesnadi Kartasasmita bahwa kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Secara ringkas kerjasama internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan

sebagai seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu ;

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat Treaty Contract.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat LawMaking Treaty terbatas dan Treaty Contract.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan bersifat Law Making Treaty

2.2.4.1 Hubungan Bilateral

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional yang akan digunakan adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dua negara dimaksud yang menjalin kerjasama bilateral sebagai objek pembahasan adalah Indonesia dan Singapura, khususnya dalam kerjasama dalam pengelolaan wilayah perbatasan oleh kedua negara sebagai negara yang bertetangga.

Berkaitan konsep hubungan bilateral, Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.¹¹Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Penggambaran tentang hubungan bilateral antara dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing. Hubungan kerjasama antara kedua Negara tidak tergantung pada Negara yang dekat saja melainkan juga Negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dan membangun kesejahteraan, maka dalam hal ini memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi

dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional

2.2.4.2 Kerja Sama Indonesia-Singapura

Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan

antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan substansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara.

Dalam rangka memajukan hubungan kedua Negara, suatu peristiwa penting terjadi melalui kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura pada tanggal 28 Juli 2015. Ketika itu, Presiden RI telah menyaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura. Peristiwa itu juga dihadiri oleh PM Singapura Lee Hsien Loong.

Dalam kunjungan, Presiden RI tidak hanya menyaksikan nota kesepahaman MoU antara Indonesia dan Singapura. Tetapi dia juga bertemu perdana dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan perdana tersebut, Presiden RI Jokowi membahas detail penanganan/pengelolaan pulau Batam, Kepulauan Riau, dan daerah sekitarnya. Menurut presiden RI Jokowi masalah penanganan Batam, Bintan, Karimun atau disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memang sudah bertahun-tahun tidak berkonsentrasi ke sana.

Padahal ada sebuah potensi yang bisa diangkat disana. Dia menjelaskan jika dalam pertemuan nanti akan ada permintaan pengembangan, baik itu dalam sektor industri ataupun pariwisata, maka hal itu diharapkannya dapat direalisasikan iapun menegaskan akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Artinya, Indonesia harus memiliki daya tawar yang kuat jika ingin serius mengelola daerah kepulauan tersebut.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Tujuan ini dicapai 2 melalui pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan di semua sektor kehidupan. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional menempati posisi yang sangat strategis bagi kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mengusahakan laju pertumbuhan daerah sesuai

dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. (Progo Nurdjaman, 2006)

Laju pertumbuhan daerah / pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa saja, karena pembangunan nasional atau daerah itu berdimensi sangat luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakekat dari tujuan pembangunan, bukan hanya “kue pembangunan” dan „pertumbuhan kue”. Sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih substansial. Oleh karena itu pembangunan pada hakekatnya adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik lahir ataupun bathin.

Merujuk dari hal tersebut di atas, maka pembangunan manusia merupakan "suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk" melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. (BPS, 2006)

Oleh sebab itu sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan) serta penguasaan atas

sumber daya (pendapatan untuk hidup layak) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.6 Liberalism

Perspektif Liberal, perspektif ini pada awalnya muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilisme. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif liberal mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi. Dengan kata lain, mereka menganjurkan pasar bebas. Konsepsi liberal Ricardian-Smithian ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dan mengasumsikan adanya keselarasan kepentingan secara alamiah di antara berbagai manusia dan berbagai bangsa. Karena itu, kalau individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa secara keseluruhan akan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, kaum liberal berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi atas berbagai pilihan kemungkinan. Seorang aktor dianggap memaksimalkan perolehan kalau ia, sesudah melakukan kalkulasi untung-rugi tentang berbagai kemungkinan, memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif paling tinggi. Kaum liberal juga yakin bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk timbulnya konflik dalam hubungan ekonomi-politik. Bahkan hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya. Jadi, kalau perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan-peraturan pemerintah, setiap aktor yang terlibat akan bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia dan, dengan demikian, kesejahteraan mereka akan bisa meningkat.

Keputusan para pelaku ekonomi nasional mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual harus didasarkan pada pertimbangan keunggulan-komparatif (“comparative advantage”). Yaitu dengan memperhatikan struktur faktor produksi masing-masing, ekonomi setiap negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki nilai keunggulan komparatif paling tinggi disbanding dengan barang yang diproduksi rekanan dagangnya. Kalau ekonomi masing-masing negara mengkhususkan kegiatan produksinya sehingga hanya menghasilkan barang-barang yang bisa mereka produksi dengan paling ekonomis, lalu mengekspor barang-barang tersebut dan mengimpor

barang-barang lain yang tidak bisa mereka produksi dengan efisien, maka dijamin akan muncul ekonomi internasional yang efisien. Kaum liberal yakin bahwa spesialisasi produksi secara internasional akan mendorong perdagangan internasional yang meningkatkan efisiensi. Efisiensi akan menjamin penurunan ongkos produksi dan peningkatan volume produksi, yang berarti juga peningkatan konsumsi.

Peranan negara, menurut perspektif ini, seharusnya sangat terbatas. Banyak bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi, sengaja maupun tidak, telah membatasi pasar dan karena itu mencegah terjadinya perdagangan yang secara potensial menguntungkan. Peranan pemerintah seharusnya diarahkan untuk menyediakan fondasi bagi bekerjanya mekanisme pasar. Misalnya, menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah persaingan tidak sehat atau monopoli dalam pasar, menyelenggarakan pendidikan, membangun infrastruktur, dan semacam itu. Liberal juga berasumsi bahwa internasional, seperti halnya dalam ekonomi domestik, terdapat keselarasan kepentingan. Dalam upaya menantang kaum Merkantilis, kaum liberal mengajukan argumen bahwa hubungan ekonomi internasional bisa dibuat menjadi “positive-sum game”. Artinya, setiap orang bisa memperoleh keuntungan dari hubungan ekonomi, walaupun keuntungan itu tidak sama besar. Selain yakin bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat saling-menguntungkan, pendukung perspektif ini juga yakin akan adanya keselarasan yang mendasar antara kepentingan nasional yang sejati dengan kepentingan ekonomi internasional. Karena itu tidak ada alasan untuk terjadinya konflik internasional dan perang.

Berhubungan dengan adanya kesamaan yang mendasar antara kepentingan nasional dengan kepentingan kosmopolitan, yaitu kepentingan akan pasar bebas, kaum liberal mengajukan argumen bahwa negara sebaiknya jangan mencampuri transaksi ekonomi yang melintas batas nasional. Melalui pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus investasi, dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap orang dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijaksanaan liberalisasi itu akan mendorong tercapainya tujuan pokok kegiatan ekonomi, yaitu pemanfaatan sumberdaya dunia yang langka secara optimum atau efisien dan maksimalisasi kesejahteraan dunia. Karena itu kaum Liberal percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri setiap bangsa harus bersikap terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Pada dasarnya, pengejaran kepentingan sendiri dalam suatu sistem ekonomi, nasional maupun internasional, yang bebas dan kompetitif bisa menghasilkan keuntungan maksimum bagi sebagian besar pelaku dalam sistem itu.

Kaum Liberal juga percaya bahwa pemerintah-pemerintah yang terlibat seharusnya mengelola ekonomi internasional seperti halnya kalau mereka mengelola ekonomi domestik. Pemerintah-pemerintah itu harus menciptakan aturan main (sering disebut “rezim internasional”) untuk mengatur pertukaran antara berbagai mata uang nasional dan menjamin bahwa tidak ada negara atau kelompok domestik yang dirugikan oleh kompetisi internasional yang “tidak sehat” atau tidak jujur.

Dengan demikian, menurut perspektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah. Peran pemerintah terbatas pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua perdagangan yang secara potensial menguntungkan bisa terlaksana. Kalau pasar berfungsi baik, tidak ada alasan ekonomik bagi timbulnya konflik politik, karena setiap orang akan memperoleh keuntungan. Dalam praktek hubungan ekonomi-politik internasional, gagasan liberal juga banyak mendapat kritik. Pertama, praktek transaksi ekonomi yang didasarkan pada gagasan liberal ternyata hanya menguntungkan yang lebih efisien, yaitu “si kuat” dan merugikan “si lemah” yang tidak efisien. Dalam dunia masa kini, penekanan pada spesialisasi dan efisiensi (sesuai dengan doktrin “keunggulan komparatif”) benar-benar telah merugikan ekonomi negara-negara kurang berkembang (NKB). Ekonomi-ekonomi NKB yang mengutamakan spesialisasi produksi menderita ketergantungan pada pasar eksternal untuk mengimpor barang yang tidak mereka hasilkan. Padahal pasar eksternal itu selalu didominasi oleh “si kuat” yang lebih maju. Penekanan pada efisiensi dalam prakteknya ternyata juga menimbulkan penggunaan teknologi yang padat-modal secara besar-besaran. Semakin canggih teknologi yang digunakan memang semakin efisien proses produksinya, tetapi umumnya membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit. Para pengkritik gagasan liberal menunjukkan bahwa teknologi semacam itu telah menimbulkan banyak pengangguran di NKB. Kaum radikal Marxis menunjukkan betapa penggunaan teknologi semacam itu di masa industrialisasi Eropa juga telah menimbulkan kesengsaraan di kalangan kelas pekerja.

Dalam arena internasional, liberalisme juga mengingkari fakta bahwa tidak semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk berkompetisi, karena adanya perbedaan dalam struktur faktor produksinya mereka. Yang kita lihat dalam hubungan ekonomi-politik internasional adalah “ketimpangan relasional” antar bangsa-bangsa. Kalau pemerintah nasional tidak melakukan intervensi ke dalam pasar internasional, perdagangan internasional dalam suasana ketimpangan seperti itu hanya akan menguntungkan ekonomi dari “si kuat”, yaitu negara yang lebih efisien. Kalau di dalam negeri liberalisme telah menghasilkan akumulasi kekayaan di tangan beberapa kapitalis, di arena internasional liberalisme telah menciptakan suatu ekonomi dunia yang didominasi oleh beberapa negara industri maju yang sangat kuat.

2.2.6.1 Neo-liberalism

Neoliberalisme menggunakan kerjasama internasional untuk mencapai keuntungan yang absolut atau absolute gains. Kaum neoliberalis tidak memperhatikan terlalu jauh mengenai keuntungan relatif dan menganggap semua pihak akan mendapatkan kelebihan dari keuntungan absolut, berbeda dengan kaum neorealis yang berpandangan bahwa negara harus memperhatikan betul keuntungan relatif dan keuntungan absolut (Lamy, 2001: 193). Neoliberalisme sederhananya merupakan perspektif yang fokus pada ekonomi politik, permasalahan lingkungan, dan akhir-akhir ini merambah pada isu hak asasi manusia yang termasuk dalam agenda isu low politics (Lamy, 2001: 193). Neoliberalisme percaya bahwa kerja sama internasional merupakan sebuah solusi utama atas sistem anarki (Baldwin, 1993). Neoliberalis percaya bahwa dengan

adanya sektor dan rezim yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian dapat mempengaruhi atau menjawab sebagian besar kepentingan negara sehingga bila kepentingan negara telah tercapai maka munculnya konflik dapat dihindarkan (Steans dan Pettiford, 2005). Kaum neoliberalis yang mempercayai adanya absolute gains yang memandang bahwa dengan keuntungan yang dibagi rata dalam kerja sama internasional, setiap pihak yang berkontribusi dalam kerja sama tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan yang absolut baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Baldwin, 1993). Baik neorealisme dan neoliberalisme memandang bahwa keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi merupakan hal terpenting dalam tujuan negara. Powell (1991) membangun model dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara penekanan neoliberal pada kesejahteraan ekonomi dan neorealis penekanan keamanan. Negara diasumsikan mencoba untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka di dunia yang mana kekuatan militer adalah suatu kemungkinan. Untuk sebagian besar, neorealists atau neoliberal memperlakukan tujuan negara dengan asumsi.

Dalam aspek intentions dan capabilities, tokoh Krasner (1991) dalam Baldwin mengkritik bahwa kaum neoliberalisme lebih mengutamakan intentions, interests dan information dibandingkan ke capabilities. Menurut neoliberalis peningkatan kapabilitas bukanlah hal-hal yang penting untuk dilakukan karena dengan kerja sama, membantu suatu negara untuk bertahan dalam situasi yang anarki (Baldwin, 1993). Pandangan yang berbeda dari kepentingan relatif dari capabilities and intentions demikian memberikan titik fokus lain dari perdebatan. Selanjutnya yaitu membahas tentang rezim dan institusi, yang menurut kaum

neorealisme bahwa kedua hal tersebut tidak terlalu penting karena dianggap tidak mempunyai power yang kuat untuk dapat mengatur suatu negara. Sedangkan kaum neoliberalis beraanggapan bahwa rezim dan institusi sangat menekankan peran dua hal tersebut dalam sistem internasional karena negara akan cenderung bekerja sama satu sama lain (Baldwin, 1993).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif neoliberalisme merupakan hasil perombakan dari perspektif liberalisme. Terdapat perbedaan dari perspektif sebelumnya, neoliberalisme ini menganggap bahwa kerjasama internasional sangat diutamakan dalam sistem internasional yang anarki ini. Dengan melakukan kerjasama dapat menciptakan peluang perdamaian internasional. Keberadaan aktor dalam neoliberalisme tidak hanya negara saja, namun keterlibatan aktor non- negara juga sangat berpengaruh. Titik fokus dalam perspektif neoliberalisme yaitu ke bidang ekonomi dan pasar global. Tidak hanya itu, namun ekonomi politik, permasalahan lainnya seperti permasalahan manusia dan hak asasi manusia juga menjadi masalah yang utama dalam neoliberalisme. Penulis berpendapat bahwa studi hubungan internasional yang bersifat dinamis, akan terus terjadi perombakan pendapat- pendapat baru seiring dengan munculnya masalah yang kompleks.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari pada pemaparan di atas, penulis memiliki asumsi utama yakni, *“Melalui Kerja Sama Kawasan Ekonomi Eksklusif Indonesia-Singapura, memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan Indeks Pembangunan*

Manusia di Kepulauan Riau, ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau”.

2.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel. 1 Oprasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Konsep Analisa
Variabel Bebas : Dengan adanya kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura	<p>1. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus BBK (Batam, Bintan, Karimun)</p> <p>2. Kawasan Ekonomi Digital Nongsa D-Town, Batam.</p>	<p>1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam suatu daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK tentunya direalisasikan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi secara merata, inilah salah satu terobosan pemerintah agar tujuan besar ini tercapai.</p> <p>Untuk Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di kawasan Kepulauan Riau ini merupakan suatau kerangka kerja sama bilateral ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura yang mana penerapan dan pengelolaannya terkhusus di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Bentuk kerja sama ini</p>

		<p>sebenarnya telah tertuang dalam draft kerja sama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006, Presiden RI pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Kawasan Ekonomi Khusus untuk wilayah BBK yang dilakukan oleh Menko Perekonomian, Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura, Lim Him Kiang di Nongsa Point Marina, Batam.</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015203011-4-194733/investasi-rp-222-t-ri-singapura-bangun-2-kek-baru</p>
<p>Variabel Terikat : Maka dampak positif akan dirasakan oleh pelaku ekonomi dan aspek HDI di Kepulauan Riau.</p>	<p>1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.</p>	<p>Data (fakta dan angka) mengenai nilai dari pada aspek HDI di Kepulauan Riau menjadi salah satu yang tertinggi dan menempati urutan ke-empat seperti yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p>https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-</p>

		provinsi.html
--	--	-------------------------------

2.5 Skema Teoritik Penelitian

Bagan 1 Skema Teoritik Penelitian

